

TUGAS ANALISI JURNAL

Nama: Eti Amanda Damanik

Npm: 2217011103

Kelas: D

Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)

Pada jurnal membahas tentang hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai sumber utama nilai dan etika dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang meliputi perlindungan seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan bangsa, dan penciptaan ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian.

Etika adalah cabang filsafat yang berfokus pada perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan hukum adalah peraturan yang disahkan untuk mengatur. Hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum dikaji dari tiga dimensi, yaitu dimensi substansi dan wadah, dimensi cakupan, dan alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum. Etika, sebagai cabang filsafat yang membahas perilaku manusia dalam masyarakat, memiliki cakupan lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika dianggap melanggar hukum. Hukum diibaratkan sebagai "kapal" yang terapung di atas "samudera" etika, yang menunjukkan bahwa etika mendasari dan melingkupi hukum dalam mengarahkan tindakan manusia menuju kebaikan.

Politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan hukum di Indonesia. Politik hukum juga mencerminkan pemilihan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan untuk mengatur perilaku. Melalui politik hukum, nilai-nilai yang ada di masyarakat dipilih dan diselaraskan dengan konstitusi untuk kemudian dijadikan pedoman hukum. Politik hukum di Indonesia sempat diwujudkan melalui TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Nasional yang kemudian berubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang diperbarui setiap lima tahun sebagai panduan kebijakan hukum negara.

Selain itu, Pancasila dijadikan sumber nilai dan etika dalam politik hukum Indonesia. Pancasila menjadi pedoman untuk merancang hukum yang sejalan dengan tujuan nasional, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Landasan utama dalam politik hukum Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur tetapi juga memperkuat moralitas masyarakat. Dengan Pancasila sebagai panduan, diharapkan produk hukum Indonesia dapat lebih menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar menegakkan aturan tanpa landasan nilai.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki peran penting dalam perencanaan hukum nasional. Melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), BPHN mengarahkan prioritas pembentukan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan adanya Prolegnas, diharapkan hukum yang dihasilkan lebih terstruktur dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.